



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembicaraan Pendahuluan dan Pembahasan RAPBN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 2. Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020); 3. Tindak lanjut Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019 ditengah wabah <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19).
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 9 (sembilan) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI D. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda pembicaraan pendahuluan dan pembahasan RAPBN TA

2021 dan rencana kerja Pemerintah Tahun 2021 dan evaluasi kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020), hari Selasa, 23 Juni 2020, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan Pagu Indikatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar **Rp277.712.190.000,-** (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar **Rp44.688.905.000,-** (*empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan tambahan anggaran Kementerian PANRB sebesar **Rp96.802.148.000,-** (*sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp31.697.302.000** (*tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kementerian PANRB Tahun 2021.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Pagu Indikatif Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2021 sebesar **Rp597.355.873.000,-** (*lima ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara mengajukan usulan tambahan anggaran BKN sebesar **Rp52.922.000.000,-** (*lima puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran BKN Tahun 2021.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan pelaksanaan seleksi CPNS saat ini sudah sampai pada tahapan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Untuk tahapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sampai dengan tahapan usul penetapan NIP sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan karena adanya wabah pandemic Covid-19.

6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan terkait penundaan SKB karena Covid-19 telah dilaksanakan rapat PANSELNAS, koordinasi dengan BNPB, dan penyusunan SOP. Rencana pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dimulai pada bulan Agustus 2020.
7. Tindak lanjut pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemik Covid-19, disampaikan sebagai berikut:
 - a. PANSELNAS CPNS telah memutuskan bahwa Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 yang tertunda akan tetap dilaksanakan.
 - b. Penyederhanaan materi SKB dengan mengurangi jenis dan materi, serta pemanfaatan teknologi informasi (video conference, dll) untuk jenis tes, seperti wawancara.
 - c. Pelaksanaan SKB akan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 yang ketat dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.
 - d. PANSELNAS akan melakukan penetapan lokasi tes yang meminimalkan pergerakan peserta.
 - e. Jadwal Tentatif Pelaksanaan SKB dengan CAT adalah mulai Minggu IV bulan Agustus, dengan catatan diharapkan sudah tidak ada lagi daerah yang menetapkan PSBB, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Penerimaan Mahasiswa/Taruna Sekolah Kedinasan telah dapat diselesaikan oleh BKN, dan jadwal masih dapat berubah menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19 yang masih belum dapat diprediksi.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Setelah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2021:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar **Rp277.712.190.000,-** (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar **Rp44.688.905.000,-** (*empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah*);
 - b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar **Rp597.355.873.000,-** (*lima ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Maka Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran per program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian PANRB sebesar **Rp96.802.148.000,-** (*sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp31.697.302.000** (*tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kementerian PANRB Tahun 2021, dan meminta kepada Anggota Banggar Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR RI.
3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran BKN sebesar **Rp52.922.000.000,-** (*lima puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah*) untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran BKN Tahun 2021, serta meminta kepada Anggota Banggar Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR RI.
4. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB untuk memastikan proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dapat meningkatkan kinerja ASN dan tidak menghambat potensi yang ada dalam diri pegawai ASN yang terdampak kebijakan tersebut.
5. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dan BKN untuk melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun 2019 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum

dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) agar pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun 2019 dapat berjalan lancar dan aman dari potensi penularan Covid 19.

6. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN dapat menjamin bahwa penyederhanaan materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada tes penerimaan CPNS Tahun 2019 tidak berakibat pada penurunan kualitas, kapabilitas, dan profesionalisme ASN.
7. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dalam menetapkan alokasi formasi CPNS benar-benar memperhatikan kebutuhan instansi pusat/daerah serta disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Jakarta, 23 Juni 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270